

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Aprita, Serlika. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Kebumen: PenA Indhis
- Hariri, Wawan Muhwan. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hartini, Rahayu. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Irawan, Bagus. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: Alumni
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra.(1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Nurani, Nina. (2009). *Hukum Bisnis: Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Insan Mandiri
- Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rudy A. Lontoh, dkk. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, Bandung

- Safira, Martha Eri. (2016). *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya
- Samadani, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sanjaya, Umar Haris. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP
- Santoso, Lukman. (2016). *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press
- Shidarta. (2019). *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*. *Bussiness Law Binus*
- Shubhan, M. Hadi. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparji. (2018). *Kepailitan*. Jakarta: UAI Press
- Sutendi, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Gia Indonesia
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, (1993). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Surabaya: Rineka Cipta
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas

## **2. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **3. Jurnal**

Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah.(2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa

- Yang Sejenis: Studi Merek Bossini”. Vol.22 Nomor 2.  
*Jurnaal Of Judicial Review*
- Kale, Gedalya Iryawan. (2018). “Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Vol. 06 No. 03. *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*
- Lestari, Tri Wahyu Surya. (2018). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah. Vol. 8 No. 2. *Yudisia*
- Rachmasarinigrum. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Proses Kepailitan”. Vol.5 Nomor 2. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. (2021). “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan”. Vol.6 Nomor 1. *Aktual Justice*
- Retnaningsih, Sonyendah. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Vol.3 Nomor 1. ADHAPER: *Jurnal Hukum Acara Perdata*
- Revita Pirena Putri dan Endang Prasetyawati. (2023). Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor. Vol.6 No.1. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*

Setiyowati, J. E. (2003). *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*. Bandung: CV.Mandar Maju

Sinaga, Niru Anita. (2019). “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”. Vol.1 Nomor 10. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*

Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung. (2021). Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasinya. Vol.4 No.2. *Undang: Jurnal Hukum*

#### **4. Lain-lain**

Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby

Wawancara Bersama Junior Associates Kantor Advokat Masyhur and Partners, Ibu Ardelia Artanti, S.H., M.H., pada hari Sabtu, 21 September 2024, Pukul 15.40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Dalam <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 4 Januari 2024, pukul 21.35 WIB

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A. “Tugas Pokok dan Fungsi Hakim”. Artikel versi online/daring (dalam jaringan). Dalam <https://pn-cibinong.go.id/tugas-fungsi-hakim/>